

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Anggara, Sahya. 2018 *Hukum Administrasi Negara* Jakarta : CV Pustaka Setia
- Ahmad Beni. Zia, Javid. Ismatullah, Deddy. 2016, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, Bandung: Pustaka Setia,
- Ashiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Buana, Mirza Satria, 2010, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia
- Hosnah, Asmak UI, et al. 2021. *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers.
- HR, Ridwan, 2018. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Rajawali Pres
- Kotijah, Siti, 2020 *BUKU AJAR HUKUM PERIZINAN Online Single Submission (OSS)* Yogyakarta : CV. MFA
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*, Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada.
- MD, Mahfud. 2012. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasyidi, Lili & Ali, Zainuddin. 2010. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sibuea, Hotma P. 2011. *Asas Negara Hukum: Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Suratman & Dillah, Philips. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Yusa, I Gede, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan Undang - Undang Dasar NRI 1945*, Malang: Setara Press, 2016

B. Jurnal

- Bagus Teguh Santoso & Sadjijono : Keputusan Fiktif Positif Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi Berdasarkan Prinsip Good Governance . Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 , Februari 2018
- Benuf, Kornelius & Azhar, Muhamad. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 26.
- Bambang Heriyanto. “PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA “FIKTIF POSITIF” DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA”. Balitbang Diklat Kumdil MA-RI. Pakuan Law Review Volume 5,2019
- Enrico Simanjuntak, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017 .
- Fadil, Muhammad Rizal,” Izin Usaha Pertambangan” Artikel Hukum Perizinan Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya
- Nainggolan, Indra Lorenly .PENINJAUAN KEMBALI PERMOHONON FIKTIF POSITIF Kajian Putusan Nomor 175 PK/TUN/2016. Jurnal Komisi Yudisial, Vol. 13 No. 2 Agustus 2020
- Suardita, I Ketut,” Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana” *Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana 2017*
- Wibowo , Suyanto Edi,” *Memahami Makna Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam*” Jurnal,2015

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertaruran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah. Berita Negara RI No. 1751, Tahun 2017.

D. Skripsi / Thesis

Natsir Bin Tahirata Pukan. 2016. *“Prospek Pembentukan Bank Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.”* Thesis. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Internet

Awas ‘Jebakan’ Penyalahgunaan Wewenang dalam Penerbitan Izin Pertambangan
<https://www.hukumonline.com/berita/a/awas-jebakan-penyalahgunaan-wewenang-dalam-penerbitan-izin-pertambangan>.

Cek Nih Kenapa Ditjen Minerba Menolak Permohonan Izin Perusahaan Tambang
<https://www.ruangenergi.com> diakses pada 28 Maret 2023

Direktori Mahkamah Agung. 2022. “Putusan NOMOR 17/G/TF/2022/PTUN.JKT”<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/796a9da00997fa893856f3e683a90c15.html>. Diakses 5 Oktober 2022.

Direktorat Tata Usaha Negara Ditjendmiltun Mahkamah Agung RI. Kuesioner

Bimtek Sengketa Fiktif Positif. Online tersedia :
[https://docs.google.com/forms/d/1WdfTp2Oq4kwzte6i3jh-RUwV5-Jx50S - ZrWZXBcaOzc/viewform?edit_requested=true](https://docs.google.com/forms/d/1WdfTp2Oq4kwzte6i3jh-RUwV5-Jx50S-ZrWZXBcaOzc/viewform?edit_requested=true) . Di akses 23 Juni 2023 Pukul 22.03 WIB

Ini Empat Jenis Konflik Pertambangan Sepanjang - <http://hukumonline//> Tahun 2020
“Ini Empat Jenis Konflik Pertambangan Sepanjang Tahun 2020 diakses pada 23 Maret 2023

Ini syarat untuk memiliki izin usaha pertambangan tahap eksplorasi.
smartlegal.id/perizinan/2021/11/05/ini-syarat-untuk-memiliki-izin-usaha-pertambangan-tahap-eksplorasi/ diakses pada 5 maret 2023

Pengertian Implementasi, Serta Faktor-Faktor dan Teori Implementasi Oleh Para Ahli Lengkap – Forum Teropong <https://teropong.id/forum/2017/08/25/pengertian-implementasi-serta-faktor-faktor-dan-teori-implementasi-oleh-para-ahli-lengkap/> diakses 10 desmber 2022

Status IUP Nasional per Januari 2023 - Ditjen Minerba (esdm.go.id) diakses pada 25 Maret 2023

Tiga Hal Ini Jadi Penyebab maraknya tambang ilegal didaerah,
<https://money.kompas.com/read/2022/07/25/144017626/tiga-hal-ini-jadi-penyebab-maraknya-pertambangan-ilegal-di-daerah?page=1> diakses 29 Juni 2023 pukul 19.42 WIB